



**BUPATI BARRU**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR 34 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 51 TAHUN  
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Program;
      2. Subbagian Keuangan; dan
      3. Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
    - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
      1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
      2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
      1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
      2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - e. Bidang kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    - f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
      1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
      2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
  6. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
  7. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dihapus.
  8. Ketentuan Pasal 29 dihapus;

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e, huruf f angka 3 dan huruf g terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
  - (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
  - (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.
  - (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Diantara BAB VI dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35A**

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

11. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kasubag Kelembagaan & Anjab	<i>[Signature]</i>
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 28 Oktober 2021

*[Signature]*  
**BUPATI BARRU,**

*[Signature]*  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 28 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

*[Signature]*  
**ABUSTAN**

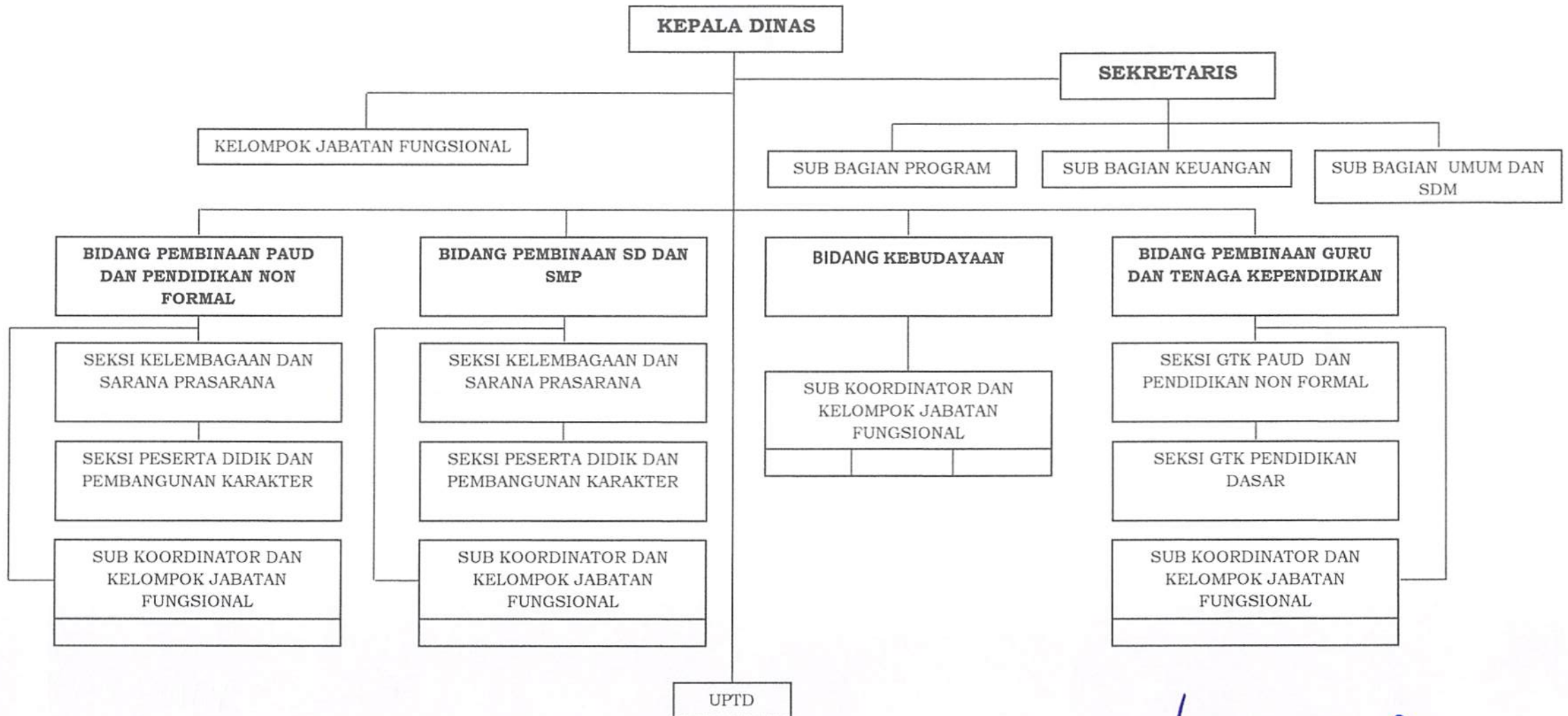
**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 34**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 34 Tahun 2021

TANGGAL : 28 Oktober 2021

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU**



BUPATI BARRU, *B*

*[Handwritten Signature]*  
SUARDI SALEH

*[Handwritten Mark]*